CSIS Commentaries is a platform where policy researchers and analysts can present their timely analysis on various strategic issues of interest, from economics, domestic political to regional affairs. Analyses presented in CSIS Commentaries represent the views of the author(s) and not the institutions they are affiliated with or CSIS Indonesia.

CSIS Commentaries DMRU-055-ID

21 April 2020

Penanggulangan COVID-19: *Best Practices* dari Taiwan, Korea Selatan, dan Jerman

Gilang Kembara

Peneliti, Departemen Hubungan Internasional CSIS Indonesia
gilang.kembara@ csis.or.id

Merebaknya virus korona pada waktu yang bersamaan di seluruh dunia mengejutkan banyak negara yang khawatir atas kapasitas infrastruktur kesehatan publiknya. Atas dasar tersebut, berbagai macam kebijakan digelontorkan oleh masing-masing negara, mulai dari penerapan karantina wilayah, penutupan perbatasan, pembatasan kunjungan dan perjalanan, serta aturan untuk bekerja dari rumah (*work from home*). Pemangku kebijakan di semua negara menimbang kebijakan mana yang patut diterapkan untuk menangani krisis kesehatan in secara efektif. Taiwan, Korea Selatan, dan Jerman telah banyak menuai pujian atas penanganan COVID-19. Artikel ini mengangkat kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh tiga wilayah tersebut, yang dapat menjadi *best practice*.

Taiwan

Pada tanggal 31 Desember 2019, Taiwan melaporkan kepada World Health Organization (WHO) bahwa ada virus korona yang dapat menular antar manusia, dan meminta agar segera dilakukan tindakan untuk memotong rantai penularan penyakit tersebut.

Akan tetapi, peringatan Taiwan tidak digubris oleh pihak WHO, yang menyebutkan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa virus yang kemudian disebut SARS-CoV-2 itu dapat menyebar melalui kontak manusia. Reaksi tersebut membuat banyak pihak mengecilkan potensi bahaya yang diakibatkan oleh penyebaran virus baru itu. Baru pada 20 Januari 2020 Kementerian Kesehatan Republik Rakyat Tiongkok mengeluarkan mengonfirmasi bahwa virus tersebut dapat menular antar manusia, setelah pernyataan WHO pada pertengahan bulan Januari yang menyatakan adanya transmisi antar manusia secara "terbatas."

Taiwan tidak ingin mengambil risiko. Belajar dari pengalamannya menghadapi wabah *Severe Acute Respiratory Syndrom* (SARS) pada tahun 2003-2004, Taiwan menggulirkan kebijakan-kebijakan kesehatan untuk mengidentifikasi dan menahan arus penyebaran virus mematikan tersebut, yang menggabungkan penggunaan *big data*, transparansi informasi, dan rantai kepemimpinan yang terpusat.

Selama bulan Januari dan Februari 2020, Taiwan mengeluarkan 124 kebijakan,[1] mulai dari penerbitan larangan kunjungan dan peringatan perjalanan, alokasi sumber daya untuk produksi masker wajah, dan pedoman untuk institusi-institusi pendidikan secara nasional. Taiwan juga segera mengaktifkan Pusat Komando Kesehatan Nasional (National Health Command Center, NHCC), dan melakukan penegakan hukum kepada siapa pun yang dengan sengaja menyebarkan informasi hoaks.

Taiwan juga menggunakan teknologi dalam mengelola penyebaran wabah COVID-19, dimulai dengan mengintegrasikan data asuransi kesehatan nasional dengan data imigrasi dan bea cukainya. Melalui tindakan tersebut, Pemerintah Taiwan dapat memonitor dan mengumpulkan informasi riwayat perjalanan 14 hari ke belakang warga, dan meminta mereka yang mengunjungi wilayah-wilayah berisiko untuk melakukan isolasi mandiri. Telepon selular juga diawasi untuk memastikan bahwa orang-orang tersebut berada tetap di dalam rumah. Pemerintah Taiwan juga segera mengaktifkan saluran *hotline* bebas pulsa agar publik dapat melaporkan berbagai macam gejala yang penyakit yang mencurigakan pada dirinya atau orang lain.

Kebijakan-kebijakan ketat tersebut disertai dengan transparansi informasi yang baik, di mana laporan dan kabar terbaru diberikan setiap hari, dan pesan layanan publik diberikan secara reguler langsung dari otoritas teratas. Informasi mengenai cuci tangan, penggunaan masker wajah, dan bahaya *panic buying* meresap ke dalam masyarakat secara efektif.

Seluruh kebijakan tersebut merefleksikan keseriusan Pemerintah Taiwan dalam menanggulangi dan memutus rantai penyebaran virus korona terbaru ini. Fakta kedekatan geografis Taiwan dengan Tiongkok, dan derasnya kunjungan masyarakat Tiongkok ke Taiwan justru memberikan dorongan bagi pemerintahnya untuk segera menerapkan peraturan-peraturan tersebut. Data terakhir menunjukkan bahwa ada 850.000 rakyat Taiwan yang berdomisili di Tiongkok, dan sekitar 2.7 juta rakyat Tiongkok mengunjungi Taiwan pada tahun 2019.[2]

Model penanggulangan COVID-19 yang dilakukan Taiwan telah mendapat berbagai macam pujian dari beberapa pemimpin-pemimpin dunia. Kesiapsiagaan yang telah diterapkan oleh otoritas-otoritas yang berwenang, dan penanggulangan yang terarah sejauh ini menghindarkan Taiwan dari dampak terburuk pandemi.

[1] Wang CJ, Ng CY, Brook RH. "Response to COVID-19 in Taiwan: big data analytics, new technology, and proactive testing". JAMA. 2020.

[2] Duff-Brown, Beth. "How Taiwan Used Big Data, Transparency, and a Central Command to Protect Its People from Coronavirus." Stanford University FSI. 03 March 2020.

Korea Selatan dan Jerman

Selain Taiwan, terdapat dua model penanggulangan krisis kesehatan yang mendapatkan banyak pujian internasional, yakni Korea Selatan dan Jerman. Melihat penyebaran COVID-19 di Korea Selatan, terdapat lebih dari 10.000 kasus positif COVID-19, dengan angka kematian di atas 200 jiwa sampai dengan bulan April 2020. Dengan angka tersebut, Korea Selatan memiliki rasio kematian pada angka 2% ke bawah. Sedangkan Jerman mencatat kurang-lebih 130.000 kasus positif COVID-19, dengan angka kematian di atas 3.000 jiwa dalam periode yang sama. Angka rasio kematian Jerman bertengger di kisaran 2.3%. Walaupun Jerman mencatat angka kasus positif dan kematian yang jauh lebih tinggi dari Korea Selatan, tetapi kedua negara ini mencatat angka rasio kematian yang serupa. Hal ini cukup penting untuk dijadikan acuan atas kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan kedua negara tersebut untuk menekan angka kematian atas infeksi COVID-19.

Pemerintah Korea Selatan mencatat kasus COVID-19 pertama kali pada tanggal 20 Januari 2020 dari seorang perempuan berkewarganegaraan Tiongkok. Antara bulan Januari hingga Februari, Korea Selatan mencatat peningkatan kasus COVID-19 yang cukup rendah, tapi kemudian mengalami kenaikan luar biasa pada pertengahan bulan Februari 2020, saat seorang warga yang dinyatakan positif mengidap virus korona menghadiri beberapa acara kongregasi Gereja Shincheonji. Kasus di gereja ini mengakibatkan meningkatnya kasus positif di Korea Selatan secara eksponensial.

Pemerintah Korea Selatan berhasil melakukan penanggulangan virus sebelum menjadi sebuah krisis. Seminggu setelah kasus pertama diidentifikasi, pihak-pihak yang berwenang segera bertemu dengan perwakilan-perwakilan perusahaan kesehatan. Pemerintah Korea Selatan mendesak agar perusahaan-perusahaan tersebut segera menggulirkan penelitian dan pembuatan alat tes virus korona untuk penggunaan masal. Setelah mendapatkan alat-alat tes, pihak berwajib segera melakukan tes masal terhadap masyarakatnya, agar dapat melakukan tindakan medis yang tangkas dan sesuai terhadap para pasien COVID-19.

Untuk mendapatkan data yang akurat, pihak pemerintah juga melacak individu-individu yang telah melakukan kontak dengan pasien yang terjangkit virus. Kepada individu-individu dilakukan tes, dan apabila diperlukan diisolasi. Masyarakat Korea Selatan kerap menerima informasi yang berkaitan dengan kasus-kasus COVID-19 di sekitar mereka, dan bagi mereka yang tengah menjalankan isolasi mandiri, diminta untuk mengunduh aplikasi yang memperingati pihak berwajib apabila individu tersebut melanggar isolasi mandiri mereka. Masyarakat diminta bekerja sama untuk mencegah terjadinya panik dan memastikan kelancaran perawatan kesehatan kepada mereka yang membutuhkan melalui berbagai macam pengumuman yang dipancarkan melalui televisi, area-area umum, dan telepon selular. Kepercayaan publik yang tinggi terhadap pemerintah menghasilkan tingkat kasus infeksi virus korona yang terkendali, tanpa harus menggelontorkan kebijakan penutupan usaha-usaha ekonomi.[3]

Pada kasus Jerman, banyak negara yang memuji bagaimana Jerman dapat menekan rasio angka kematian jauh di bawah negara-negara Eropa lainnya. Italia, negara dengan jumlah kasus positif tertinggi di Eropa mencatat rasio angka kematian sebesar 11-12%, sedangkan Spanyol di peringkat kedua mencatat rasio sebesar 9-10%. Memang tidak ada satu jawaban atau solusi yang dapat menjelaskan bagaimana Jerman berhasil menekan angka kematian sampai dengan bulan April 2020, karena ada berbagai macam faktor

[3] Fisher, Max; Sang-Hun, Choe. "How South Korea Flattened the Curve." *The New York Times*. 23 March 2020.

yang berkontribusi untuk meraih kondisi yang dialami Jerman saat ini.

Serupa dengan Korea Selatan, Jerman menekankan identifikasi dini agar dapat mempersiapkan kebijakan kesehatan yang lebih terarah. Melalui cara ini Jerman berhasil mencatat banyak kasus positif dari populasinya, berbanding dengan beberapa negara yang baru melakukan pengetesan pada kelompok rentan dan yang telah jatuh sakit. Warga negara yang positif terjangkit COVID-19 segera diisolasi dan pihak berwajib segera melakukan pelacakan terhadap individu-individu yang telah melakukan kontak dengan para pasien. Jerman juga menerapkan desentralisasi penanggulangan COVID-19. Berbeda dengan beberapa negara yang mengkoordinasi penanggulangan melalui pemerintah pusat, Jerman memberikan wewenang kepada setiap pemerintah negara-negara bagian, yang masing-masing memiliki pakar-pakar kesehatannya sendiri, untuk mengelola penyebaran virus korona.[4]

Jerman juga memberikan izin bagi klinik, laboratorium, dan universitas swasta untuk melakukan pengetesan virus korona. Hal ini memberikan keleluasaan dan otonomi bagi fasilitas-fasilitas kesehatan untuk memberikan diagnosanya terhadap terduga COVID-19.[5]

Best Practices dan Tantangan

Tiga model di atas menerapkan beberapa kebijakan untuk menanggulangi wabah COVID-19 dengan esensi yang serupa. Pertama, *pencegahan dini* mempunyai potensi besar untuk memperkecil angka kematian yang diakibatkan oleh COVID-19. Dengan melakukan pengetesan dan identifikasi sejak awal dalam jumlah yang masal, pihak yang berwenang akan mempunyai gambaran yang lebih jelas atas penyebaran virus. Kasus-kasus positif juga dapat memberikan jendela bagi pihak berwenang untuk melakukan pelacakan kontak untuk segera memutus rantai penyebaran virus korona. Pemberian wewenang bagi seluruh fasilitas kesehatan, baik umum maupun swasta, dapat menyentuh segala lapisan masyarakat dengan tangkas dan akurat, tanpa harus terbebani dengan benang merah birokrasi.

Kedua, *Desentralisasi wewenang*. Memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 dapat mengurangi beban birokrasi pada pemerintah pusat. Tentu hal ini harus diiringi dengan rantai komunikasi yang tegas dan jelas. Otoritas tertinggi jelas harus tetap berada di tangan pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah dapat melakukan tindakan-tindakan yang berlandaskan arahan dan aturan pemerintah pusat.

Ketiga, *Informasi yang transparan dan terpercaya.* Kebijakan ini diyakini dapat membantu untuk mengurangi kekhawatiran masyarakat atas minimnya pengetahuan mereka terhadap COVID-19. Selama informasi yang mengalir datang dari kanal-kanal yang sudah terverifikasi dan berbasiskan bukti, masyarakat akan yakin atas tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh pihak berwenang dalam penanggulangan wabah COVID-19. Tindakan tegas juga harus diberikan kepada mereka yang dengan sengaja menyebarkan informasi-informasi yang meresahkan dan menyesatkan, sebelum informasi tersebut tersebar luas.

Untuk mengadopsi ketiga *best practices* tersebut, ada dua tantangan besar di Indonesia yang harus kita sadari, yakni otonomi daerah, dan kondisi geografis negara ini. Kendala pada sistem otonomi daerah di Indonesia mengarah kepada lemahnya kekuatan pemerintah pusat untuk mengawasi dan memastikan agar kebijakan yang dijalankan di daerah sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Sudah banyak kasus di mana pemerintah daerah menerbitkan peraturan-peraturan daerah yang bertentangan dengan undang-undang nasional.

[4] Schumacher, Elizabeth. "Germany's coronavirus response: Separating fact from fiction." *DW*. 7 April 2020.

[5] Morris, Chris. "Coronavirus: What can the UK learn from Germany on testing?" *BBC News*. 11 April 2020.

Terakhir, kondisi geografis Indonesia sungguh berbeda apabila kita bandingkan dengan ketiga negara di dalam tulisan ini. Dengan 270 juta penduduk yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau, sangat sulit untuk memastikan agar arus logistik alat-alat kesehatan dapat tersebar dan siap dipakai di seluruh provinsi negeri ini. Sebagai contoh, alat pengetesan virus korona yang umumnya diimpor dari luar negeri hanya dapat masuk melalui pelabuhan-pelabuhan terbesar Indonesia. Alat tersebut memerlukan waktu tambahan agar pihak yang berwenang dapat mengirimnya ke seluruh pelosok negeri ini. Dalam konteks krisis kesehatan ini, kontur geografis Indonesia seperti menjadi pemisah, bukan jembatan antar seluruh pulau di Indonesia.

CSIS Indonesia, Pakarti Centre Building, Indonesia 10160
Tel: (62-21) 386 5532| Fax: (62-21) 384 7517 | csis.or.id

COVID-19 Commentaries Editors
Philips J. Vermonte, Shafiah Muhibat, Vidhyandika Perkasa, Yose Rizal Damuri, Beltsazar Krisetya